LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PADA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(KOMNAS HAM)
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan FKP ini adalah wujud nyata dari komitmen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan. Forum ini, yang diselenggarakan pada Senin, 28 Juli 2025, merupakan langkah strategis untuk menciptakan ruang dialog dan diskusi dua arah dengan *stakeholders*.

Fokus utama dari FKP 2025 adalah mereviu dan mengevaluasi tiga layanan publik inti yang diselenggarakan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM, yaitu: layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas). Tujuan utama FKP adalah mendapatkan masukan, saran, dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, telah berhasil dicapai.

Melalui dialog yang konstruktif dengan para pihak, kami berhasil mengidentifikasi berbagai masalah krusial. Isu-isu yang teridentifikasi meliputi perlunya optimalisasi digitalisasi layanan perpustakaan dan perbaikan akses *website*, minimnya integrasi dan koordinasi rutin terkait Data HAM, serta perlunya pengembangan metode penyebarluasan wawasan HAM yang lebih bervariasi dan masif.

Hasil dari pelaksanaan FKP ini telah dirumuskan menjadi sebuah Rencana Aksi yang konkret. Rencana Aksi ini memuat langkah-langkah strategis, antara lain: pengembangan Data HAM melalui mekanisme berbagi pakai data, rapat koordinasi rutin setiap 3 bulan, perbaikan *query database* Data HAM, hingga penjajakan kerja sama dengan KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas untuk pemenuhan hak-hak anak dan aksesibilitas layanan.

Biro Dukungan Pemajuan HAM berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah dihasilkan. Kami meyakini bahwa hasil FKP

ini akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan yang relevan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM.

Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan penting dan membantu Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam reviu standar layanan publik ke depan.

Jakarta, Oktober 2025
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

Endang Sri Melani

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas) Biro Dukungan Pemajuan HAM, Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian serta tindak lanjut perbaikan layanan.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

a. Rancangan kebijakan;
b. Penerapan kebijakan;
c. Dampak kebijakan;
d. Evaluasi pelaksanaan kebijakan;
e. Permasalahan pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

   Hari : Senin

   Tanggal : 28 Juli 2025

b. Tempat Pelaksanaan

   - Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat
   - Zoom Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

   1) Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan
   2) Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
   3) Ketua Tim Kerja Penyuluhan
   4) Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Penelitian
   5) Pengelola Perpustakaan Komnas HAM
   6) Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
   7) Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)

b. Peserta FKP

   1) Johannes Widjiantoro (Anggota Ombudsman RI)
   2) Siti Uswatun H. (KKU II Ombudsman RI)

3) Tuti Widiastuti (Dekan Universitas Gunadarma)
4) Tito Sianipar (Hukumonline)
5) Sonya Claudia Siwu (Pusham Universitas Surabaya)
6) Irene Christine Malau (Komisi Nasional Disabilitas)
7) Syahrul Baihaqi (Jurnalis Forum Keadilan)
8) Aldeta Oktaviyani (PBHI)
9) Zahwa Amalia Safitri (Daniel S. Lev Law Library)
10) Dyandra Athifa (Daniel S. Lev Law Library)
11) Muhammad Ryuki (Daniel S. Lev Law Library)
12) Bemby Agustian (KPAI)
13) Nugroho Adipradana (Fakultas Katolik Indonesia Atma Jaya)
14) Sekretariat Provinsi Komnas HAM

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara *hybrid* yaitu secara tatap muka dan *online*.

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00 s.d 09.30	Registrasi Peserta	
09.30 s.d 09.45	Sambutan dan Pembukaan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Bapak Abdul Haris Semendawai	Dipandu MC
09.45 s.d 10.15	Pemaparan oleh Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM	
10.15 s.d 11.00	Tanggapan	
11.00 s.d 11.30	Perumusan Berita Acara	
11.30 s.d 11.45	Pembacaan dan tanda tangan Berita Acara	
11.45 s.d 12.00	Penutupan	Dipandu MC

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

a. Belum adanya agenda koordinasi rutin Data HAM serta masih minimnya pelibatan stakeholder penyusun Data HAM dalam memantau dan meningkatkan kualitas layanan.
b. Informasi yang diberikan oleh Komnas HAM dalam konten-konten yang dihasilkan sejauh ini belum menunjukkan pembaharuan.
c. Belum terlihat informasi dan konten-konten yang berkaitan dengan Mitra Komnas HAM.
d. Belum optimalnya digitalisasi serta informasi terkait layanan Perpustakaan Komnas HAM.
e. Metode dan lingkup penyebarluasan wawasan HAM masih terbatas.
f. Belum ada integrasi antara Data HAM dengan Kementerian/Lembaga atau lembaga HAM lainnya.
g. Website Perpustakaan Komnas HAM tidak dapat diakses.
h. Sarana dan prasarana Perpustakaan masih terbatas.
i. Belum ada informasi terkait data dan kasus yang diterima atau ditangani oleh Komnas HAM.
j. Pencarian dokumen dengan hasil yang ditampilkan pada Data HAM belum berkesinambungan.
k. Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM pada website Data HAM belum terupdate.
l. Promosi literasi HAM belum dilakukan secara masif.
m. Minimnya sosialisasi alur dan tahapan proses pengaduan atas layanan Komnas HAM secara keseluruhan.
n. Masih minimnya informasi dan konten terkait Pemenuhan Hak Anak.
o. Aksesibilitas layanan Data HAM.

2. Analisis

Identifikasi masalah yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan layanan saat ini dengan harapan dan kebutuhan public (stakeholder).

Masalah-masalah ini berpusat pada digitalisasi, aksesibilitas, kualitas konten/informasi, dan koordinasi/keterlibatan stakeholder.

a. Layanan Data HAM: Isu utama pada layanan Data HAM adalah sistem informasi dan tata kelola secara keseluruhan.
b. Kualitas Konten dan Komunikasi: Isu utama dalam konten adalah relevansi, up-to-date, dan cakupan tematik.
c. Layanan Perpustakaan: Isu utama pada layanan perpustakaan berpusat pada digitalisasi dan infrastruktur.
d. Layanan Penyuluhan dan Mekanisme Pengaduan Layanan: Isu utama dalam penyuluhan dan pengaduan layanan adalah jangkauan dan kejelasan prosedur.

3. Rencana Aksi

a. Terkait dengan layanan Sistem Informasi Data HAM:
    1) Pengembangan Data HAM baik secara sistem maupun tata kelola dengan meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan sistem dan tata kelola.
    2) Reviu dan evaluasi penggunaan Data HAM melalui rapat koordinasi rutin berkala (3 – 4 bulan sekali).
    3) Menyediakan ruang informasi kegiatan mitra yang dapat diplubikasikan melalui Data HAM (berkaitan dengan hasil rapat koordinasi berkala).
    4) Terkait integrasi dengan Data HAM dengan Kementerian/Lembaga atau lembaga HAM lainnya, perlu didiskusikan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna.
    5) Akan dilakukan penambahan fitur terkait dengan perkembangan kasus atau data dalam Data HAM.
    6) Akan dilakukan perbaikan *query database* pada Data HAM agar hasil pencarian dokumen yang ditampilkan berkesinambungan.
    7) *Updating* Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM beserta kontak yang dapat diakses dalam Data HAM.

8) Mengenai masalah akses layanan Data HAM, akan dilakukan penjajakan kerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas terkait pemanfaatan Data HAM.

b. Terkait layanan Perpustakaan:
    1) Perbaikan akses dan peningkatan website Perpustakaan Komnas HAM dengan melibatkan Biro Umum.
    2) Menginterkoneksi antara Perpustakaan Digital dengan Data HAM.
    3) Terkait sarana dan prasara perpustakaan, akan diusulkan kepada Biro Umum.
c. Terkait pembaruan informasi dalam konten-konten yang dihasilkan oleh Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama serta akan dilakukan pengemasan metode kampanye secara relevan dan mutakhir.
d. Pemanfaatan platform yang sudah tersedia dan pemilahan terhadap publikasi dan pemilahan terhadap publikasi Komnas HAM yang sudah terdigitalisasi.
e. Tetap melibatkan target audience penyuluhan tidak terbatas pada kampus.
f. Mengembangkan metode penyebarluasan wawasan HAM yang lebih bervariasi dan inklusif.
g. Pelibatan promosi literasi HAM dengan melibatkan lembaga HAM akan diusulkan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk mendapatkan atensi dari Komisioner.

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas), maka Biro Dukungan Pemajuan HAM berkomitmen untuk :

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;
2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam reviu standar layanan publik.

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Jl. Cisadane No.25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELAYANAN PERPUSTAKAAN, PENYULUHAN HAM DAN DATA HAM
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM KOMNAS HAM

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 Juli 2025) pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perpustakaan, Penyuluhan HAM dan Data HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut & Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Belum ada agenda koordinasi rutin Data HAM serta masih minimnya pelibatan stakeholder penyusun Data HAM dalam memantau dan meningkatkan kualitas layanan	Mengefektifkan kembali rapat koordinasi rutin untuk memantau dan mengawal pelaksanaan pelayanan Data HAM bersama dengan kontributor Data HAM	1. Pengembangan Data HAM baik secara sistem maupun metode dengan menggunakan mekanisme berbagi pakai data. 2. Reviu dan evaluasi penggunaan Data HAM melalui rapat koordinasi rutin berkala (3 bulan sekali)
2.	Informasi yang diberikan oleh Komnas HAM dalam konten-konten yang dihasilkan sejauh ini belum menunjukkan pembaharuan	Pembaharuan informasi dalam konten-konten yang dihasilkan oleh Komnas HAM melalui seluruh media komunikasi	1. Berkoordinasi dengan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama 2. Pengemasan metode kampanye secara relevan dan mutakhir (Desember 2025)
3.	Belum terlihat informasi dan konten-konten yang berkaitan dengan Mitra Komnas HAM	1. Pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerjasama dan mengidentifikasi kebutuhan satu sama lain 2. Pembaharuan konten terkait dengan kegiatan Mitra Komnas HAM	Menyediakan ruang informasi kegiatan mitra yang dapat dipublikasikan melalui Data HAM (*berkaitan dengan hasil rapat koordinasi berkala*) (Desember 2025)
4.	Belum optimalnya digitalisasi serta informasi terkait layanan Perpustakaan Komnas HAM	1. Digitalisasi atau pencatatan koleksi buku dalam perpustakaan Komnas HAM 2. Studi banding dengan Perpustakaan Nasional agar koleksi perpustakaan dapat diakses secara online 3. Penyebarluasan informasi terkait Perpustakaan Komnas HAM melalui social media	1. Pemanfaatan *platform* yang sudah tersedia dan pemilahan terhadap publikasi Komnas HAM yang sudah ter-digitalisasi 2. Menginterkoneksi antara Perpustakaan Digital dengan Data HAM (Juli 2026)

5.	Metode dan lingkup penyebarluasan wawasan HAM masih terbatas	1. Memperluas kerjasama penyebarluasan wawasan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar lokus penyuluhan tidak hanya menyasar pada universitas/kampus tetapi juga dapat menyasar pada lembaga lainnya (lapas, dll) 2. Menambahkan inovasi metode penyebarluasan wawasan HAM dengan metode simulasi	1. Tetap melibatkan target *audience* penyuluhan tidak terbatas pada kampus 2. Mengembangkan metode penyebarluasan wawasan HAM yang lebih bervariasi dan inklusif (Desember 2025)
6.	Belum ada integrasi antara Data HAM dengan Kementerian/Lembaga atau lembaga HAM lainnya	1. Pengembangan layanan Data HAM agar dapat terintegrasi dengan lembaga lainnya 2. Perluasan kerjasama antara Data HAM dengan Kementerian/Lembaga lainnya	Perlu didiskusikan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna (Desember 2025)
7.	Website Perpustakaan Komnas HAM tidak dapat diakses	Perbaikan website Perpustakaan Komnas HAM	Perbaikan akses website Perpustakaan dengan melibatkan Biro Umum (Oktober 2025)
8.	Sarana dan prasarana Perpustakaan yang masih terbatas	Sarana dan prasarana Perpustakaan perlu diperbaiki, ruangan diperluas	Akan diusulkan kepada Biro Umum Komnas HAM (Agustus 2025)
9.	Belum ada informasi terkait data dan kasus yang diterima atau ditangani oleh Komnas HAM	Penambahan arsip dan data-data kasus yang diterima atau ditangani Komnas HAM pada Data HAM	Penambahan fitur terkait dengan perkembangan kasus atau data dalam Data HAM (Juli 2026)
10.	Pencarian dokumen dengan hasil yang ditampilkan pada Data HAM belum berkesinambungan	Melakukan sinkronisasi antara pencarian dokumen dengan hasil kajian yang ditampilkan	Perbaikan *query database* pada Data HAM (September 2025)
11.	Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM pada website Data HAM belum terupdate	Memperbaharui data Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM disertai dengan kontak yang dapat diakses	*Updating* Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM beserta kontak yang dapat diakses dalam Data HAM (Desember 2025)
12.	Promosi literasi HAM belum dilakukan secara masif	Optimalisasi promosi literasi HAM oleh Komnas HAM dengan melibatkan lembaga HAM	Diusulkan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk mendapatkan atensi dari Komisioner (Agustus 2025)
13.	Minimnya sosialisasi alur dan tahapan proses pengaduan atas	Meningkatkan sosialisasi terkait alur dan tahapan proses pengaduan atas	Akan dikirimkan Nota Dinas ke Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal terkait alur

	layanan Komnas HAM secara keseluruhan	layanan Komnas HAM secara keseluruhan	dan tahapan layanan Komnas HAM secara keseluruhan (Agustus 2025)
14.	Masih minimnya informasi dan konten terkait Pemenuhan Hak Anak	Menambahkan konten-konten terkait dengan pemenuhan hak-hak anak	Menjajaki peluang kerjasama dengan KPAI terkait pemanfaatan Data HAM (Desember 2025)
15.	Aksesibilitas layanan Data HAM	Memastikan layanan yang diberikan sudah memperhatikan prinsip inklusivitas	Menjajaki peluang kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas terkait pemanfaatan Data HAM (Desember 2025)

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juli 2025
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

Endang Sri Melani

No.	NAMA	INSTITUSI	NO. HANDPHONE	TANDA TANGAN
1.	Johannes Widjiantoro	Ombudsman Republik Indonesia	0817285578	
2.	Tuti Widiastuti	Universitas Gunadarma	021 788 1033441	
3.	Aldeta Oktaviyani	Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia	081398466780	
4.	Syahrul Baihaqi	Forum Keadilan	0813 86 980266	
5.	~~Dyandra Athifa~~ Zahwa Amalia	Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev	085156179140	
6.	Tito Sianipar	Hukum Online	08167644142	

Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,

Endang Sri Melani

Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Penyuluhan,

Hari Reswanto

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Pukul : 09.00 - 12.00 WIB
Kegiatan : forum konsultasi publik
Biro Dukungan Pemajuan HAM.

No.	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan
1.	Endang Sri Melani	Karo Duk. Pemajuan HAM	
2.	Aria Candra R	Biro Umum/ortala	
3	Sri Hariyu	Biro umum / ortala	
4	Puspawati	KH	
5.	Feri Lutfi	Komnas HAM / Penyuluh	
6.	Muhaman Arief Y	KH / Penyuluhan	
7.	Musthafa Lubis	KH	
8	Arief Ramadhan	PP / KH.	
9.	Delsy Nike	KH	
10.	Hari Permadi	KH	
11.	Zaidra Birru B.	KH	
12.	Anastasia Tamara	KH	
13.	Rasiya Moira	UI	
14	Liza Yolanda	KH	
15.	ABDUL HARIS SEMENDAWAI	Komisioner KH	
16.	Nur Afifa Fauzia	Komnas HAM	
17.	Wahyu Eko Prasetyo	KH	
18.	Utari Putri Wardani	Komnas HAM	
19.	Perwakilan	RT	
20.	Hartati	PP	

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Pukul : 09.00 - 12.00 WIB
Kegiatan : Forum Konsultasi Publik
Biro Dukungan Pemajuan HAM.

No.	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan
1.	Johannes Widijantoro	Anggota / Ombudsman	
2.	Sri Usrah H	KKU II / Ombudsman	
3.	Yuli Widiastuti	UNIV. GUNADARMA	
4.	ALDETA OKTAVIYANI	PBHI / Project Officer	
5.	Syahrul Baihaqi	Forum Keadilan / Jurnalis	
6.	Dyandra Athifa	Daniel S Lev Law Library.	
7.	Zahwa Amalia Safitri	Daniel S Lev Law Library	
8.	Muhammad Ryuki	Daniel S Lev Law Library	
9.	TITO SIANIPAR	HUKUMONLINE	
10.	INGGINO	K.H.	

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi/Lembaga/Unit Kerja	Kesan & saran atas Layanan Publik Biro Dukungan Pemajuan HAM
7/28/2025 9:25:25	Fatwa Hidayah	Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM	Agar dapat bersinergi lebih baik
7/28/2025 9:25:35	Rudy Kurniawan	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku	Lebih ditingkatkan lagi
7/28/2025 9:25:42	Bernadetta Bekti Aristyawati	Komnas Disabilitas	Sudah bagus tapi perlu ditingkatkan agar lebih bagus lagi.
7/28/2025 9:25:45	Nami Puspita Sari	Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat	-
7/28/2025 9:29:14	SARI MELATI	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh	-
7/28/2025 9:50:24	Novalia Agnes Nere	Komnas HAM Perw. Papua	keren
7/28/2025 9:55:03	Astri	Komnas HAM / Biro Umum / Timja Ortala	Makin maju dan berkembang Yanlik Biro Duk Pemajuan HAM
7/28/2025 10:08:20	Kusmianto	Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan barat	sangat baik dan perlu di tingkatkan sarana dan prasarana pendukung terutama pada setkom di perwakilan, yang dalam hal ini sarana dan prasarana pendukung belum memadai (keterbatasan fasilitas)
7/28/2025 10:21:57	Sonya Claudia Siwu	PUSHAM UBAYA (Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)	Peningkatan Layanan PUSDAHAMNAS KOMNAS HAM RI dengan koordinasi rutin bersama para kolaborator PUSDAHAMNAS.
7/28/2025 10:24:56	Bemby Agustian	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Sangat bermanfaat
7/28/2025 10:48:35	Nugroho Adipradana	Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Sudah baik
7/28/2025 11:14:13	Irene C Malau	Komnas Disabilitas	aksesibilitas bagi seluruh ragam penyandang disabilitas dalam mengakes layananan digital maupun layanan offline komnas HAM
7/28/2025 11:38:14	Feronica	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Tidak ada saran karena kinerja layanan sudah baik
7/28/2025 11:58:28	Vanesya Yustriandita	Komnas HAM	-
7/28/2025 12:04:53	Lasfikarman	Biro Umum	Sudah bagus untuk layanan publiknya tp ada di beberapa sektor yang perlu di tingkatkan lagi
7/28/2025 12:05:02	Musthofa Kamal	Setjen Komnas HAM	jaya selalu Komnas HAM

LAMPIRAN III Surat Undangan

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Jl. Cisadane No.25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

Nomor : 049/OT.05.00/0.3.4/VII/2025 Jakarta, 22 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Yang Terhormat
(Daftar Undangan Terlampir)
di tempat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM.

Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, partisipasi publik menjadi keharusan dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan inklusif. Partisipasi publik tersebut diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, kami mengundang Ibu/Bapak dalam FKP Biro Dukungan Pemajuan HAM yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu : pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat
Zoom Meeting : Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Puspa (0812-1872-323) atau Sdri. Fifa (0812-8787-983). Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Ibu/Bapak, disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,

Endang Sri Melani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Undangan
Nomor : 049/OT.05.00/0.3.4/VII/2025
Tanggal : 22 Juli 2025

DAFTAR NAMA UNDANGAN

Yang Terhormat:

1. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
2. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
3. Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND)
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
6. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
8. Ketua Pusham Universitas Surabaya (Ubaya)
9. Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI
10. Editor-in-Chief Hukumonline
11. Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev
12. Kepala Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta
13. Kepala Perpustakaan Freedom
14. Syahrul Baihaqi, jurnalis Forum Keadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERANGKA ACUAN KERJA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia.

Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Forum ini ditujukan untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan *stakeholders* dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, serta tindak lanjut perbaikan layanan.

C. Manfaat

1. Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan dan keburuhan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
   a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
d. mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksaan kebijakan;
e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3. Manfaat FKP khusus bagi publik:
   a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
   b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
   c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
   d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
   e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Peserta Kegiatan

1. Pengelola Perpustakaan Komnas HAM
2. Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
3. Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)
4. Pengguna Perpustakaan Komnas HAM
5. Pengguna Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
6. Pengguna Data HAM (Pusdahamnas)
7. Perwakilan dari Lembaga HAM Nasional:
   a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
   b. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
   c. Komisi Nasional Disabilitas (KND)
   d. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Ahli/praktisi layanan publik
9. Akademisi
10. Mahasiswa
11. Organisasi masyarakat sipil
12. Media massa

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4b Menteng, Jakarta Pusat

F. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai rujukan dan pertanggungjawaban kegiatan.

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

Nomor : 051/OT.05.00/0.3.4/VII/2025 Jakarta, 22 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Yang Terhormat
(Daftar Undangan Terlampir)
di tempat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM.

Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, partisipasi publik menjadi keharusan dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan inklusif. Partisipasi publik tersebut diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, kami mengundang Ibu/Bapak dalam FKP Biro Dukungan Pemajuan HAM yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu : pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat
Zoom Meeting : Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Puspa (0812-1872-323). Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Ibu/Bapak, disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,

Endang Sri Melani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Undangan
Nomor : 051/OT.05.00/0.3.4/VII/2025
Tanggal : 22 Juli 2025

DAFTAR NAMA UNDANGAN

Yang Terhormat:

1. Wakil Ketua Bidang Internal
2. Sekretaris Jenderal
3. Kepala Biro Umum
4. Hari Reswanto
5. Eka Christiningsih Tanlain
6. Louvikar Alfan Cahasta
7. Nur Afifa Fauzia
8. Liza Yolanda
9. Feri Lubis
10. M. Arief Yaenudin
11. Utari Putri W.
12. Puspawati
13. Arief Ramadhan
14. Anastasia Tamaro
15. Wahyu Eko Putra

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERANGKA ACUAN KERJA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia.

Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Forum ini ditujukan untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan *stakeholders* dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, serta tindak lanjut perbaikan layanan.

C. Manfaat

1. Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan dan keburuhan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
   a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
d. mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksaan kebijakan;
e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3. Manfaat FKP khusus bagi publik:
   a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
   b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
   c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
   d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
   e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Peserta Kegiatan

1. Pengelola Perpustakaan Komnas HAM
2. Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
3. Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)
4. Pengguna Perpustakaan Komnas HAM
5. Pengguna Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
6. Pengguna Data HAM (Pusdahamnas)
7. Perwakilan dari Lembaga HAM Nasional:
   a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
   b. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
   c. Komisi Nasional Disabilitas (KND)
   d. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Ahli/praktisi layanan publik
9. Akademisi
10. Mahasiswa
11. Organisasi masyarakat sipil
12. Media massa

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4b Menteng, Jakarta Pusat

F. Penutup

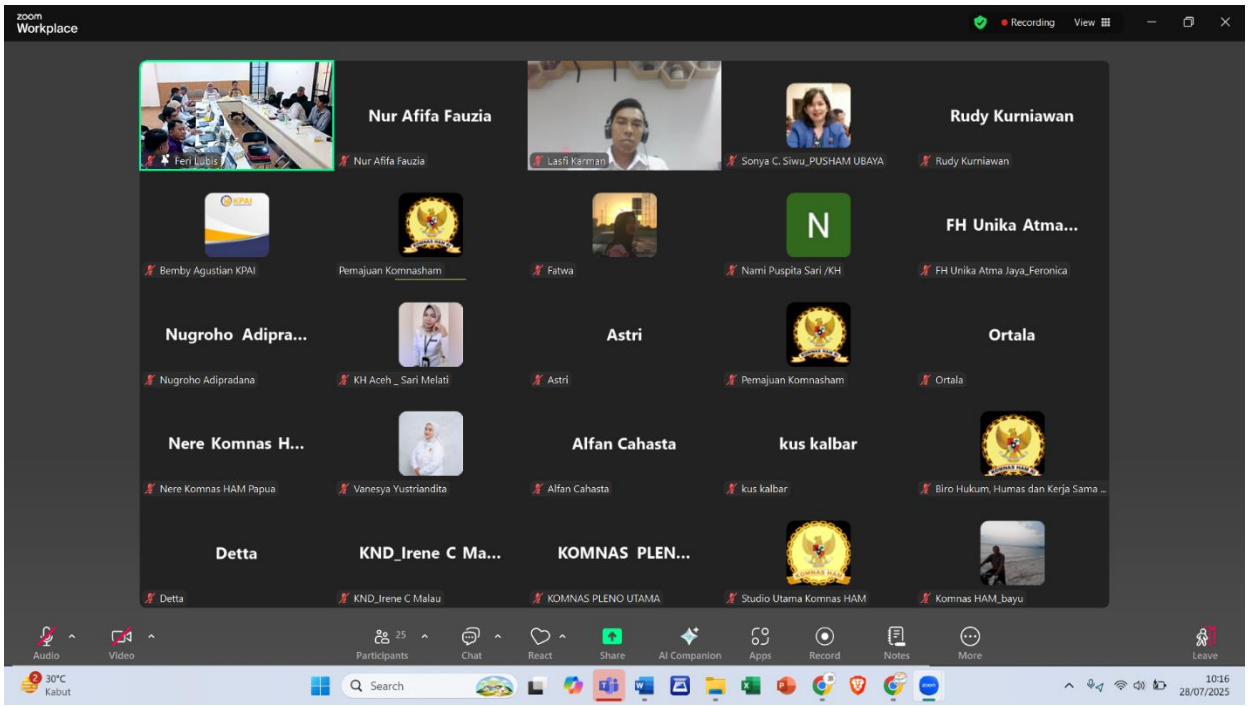
Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai rujukan dan pertanggungjawaban kegiatan.

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan








zoom Workplace
Recording
View
Feri Lubis
Nur Afifa Fauzia
Nur Afifa Fauzia
Lasfi Karman
Sonya C. Siwu_PUSHAM UBAYA
Rudy Kurniawan
Rudy Kurniawan
Bemby Agustian KPAI
Pemajuan Komnasham
Fatwa
Nami Puspita Sari /KH
FH Unika Atma...
FH Unika Atma Jaya_Feronica
Nugroho Adipra...
Nugroho Adipradana
KH Aceh _ Sari Melati
Astri
Astri
Pemajuan Komnasham
Ortala
Ortala
Nere Komnas H...
Nere Komnas HAM Papua
Vanesya Yustriandita
Alfan Cahasta
Alfan Cahasta
kus kalbar
kus kalbar
Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama ...
Detta
Detta
KND_Irene C Ma...
KND_Irene C Malau
KOMNAS PLEN...
KOMNAS PLENO UTAMA
Studio Utama Komnas HAM
Komnas HAM_bayu
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
AI Companion
Apps
Record
Notes
More
Leave
30°C
Kabut
Search
10:16
28/07/2025